

BAB VI

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Fokus penelitian ini sebagaimana dipaparkan dalam Bab Pendahuluan, lebih menekankan pada analisis dan pengembangan model efektivitas manajemen pendidikan berbasis kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan profesional kedinasan keahlian teknik bidang pekerjaan umum. Permasalahan yang dihadapi untuk mengembangkan model efektivitas manajemen pendidikan berbasis kemitraan ini dianalisis dari empat aspek. Pertama, aspek nilai strategisnya dalam perspektif jangka panjang, baik bagi perguruan tinggi mitra, organisasi instansi pengutus karyasiswa maupun bagi Departemen Pekerjaan Umum selaku Pembina teknis dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum; Kedua, aspek penyusunan/perumusan program kerjasama pendidikan, yang mencakup program utama dan program penunjang; Ketiga, aspek perilaku masing-masing institusi yang bermitra dalam penyelenggaraan kegiatan kemitraan; Keempat, Aspek Indikator kualitas kemitraan yang disepakati oleh masing-masing mitra, serta implementasinya dilapangan oleh masing-masing mitra. Berdasarkan hasil analisis dari keempat aspek tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di berbagai daerah sebagai konsekwensi logis diterapkannya kebijakan otonomi daerah serta dalam upaya pemulihan kondisi perguruan tinggi yang menghadapi masalah serius dalam hal kualitas dan



relevansi, menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antara Departemen Teknik dan Perguruan Tinggi merupakan hal yang sangat strategis. Kerjasama kemitraan ini dapat meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan tinggi dengan lapangan kerja. Kerjasama antara Departemen Pekerjaan Umum, Pemda dan perguruan tinggi dapat menghasilkan sinergi antara dua kekuatan besar yang memiliki sumber daya (dana, sarana dan prasarana pendidikan berupa kampus-kampus Balai) dengan kekuatan yang memiliki berbagai keahlian dalam berbagai bidang yang dibutuhkan Departemen Pekerjaan Umum (teknik pengembangan sumber daya air, Teknik jalan dan jembatan, Teknik perencanaan wilayah dan kota, serta bidang-bidang lainnya). Namun, kelemahan yang ditemui dilapangan, dalam praktek kemitraan yang dilakukan Pusdiktek dengan perguruan tinggi, belum sepenuhnya berorientasi pada faktor-faktor strategis kemitraan. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan mekanisme/proses penetapan perguruan tinggi mitra yang dilakukan pihak Departemen Pekerjaan Umum, dalam beberapa kasus tidak berdasarkan pertimbangan keunggulan kompetitif dari perguruan tinggi tersebut, tapi semata-mata pertimbangan politis dan faktor kedekatan secara individual antara kedua pimpinan lembaga yang bermitra. Berdasarkan kajian teori, tentunya perlu ada mekanisme kompetitif antar perguruan tinggi yang akan bermitra dengan Departemen Pekerjaan Umum. Hal ini mengindikasikan perlu ada persaingan yang sehat (kompetitif) antar perguruan tinggi, sehingga mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan dengan kualitas manajemen, kualitas dosen, dan kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki.

Kedua, penyusunan program kerjasama kemitraan antara Pusdiktek Departemen Pekerjaan Umum dengan perguruan tinggi belum dilaksanakan dengan baik, sifatnya

masih parsial dan belum mengacu pada dokumen rencana strategis maupun rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah. Dokumen-dokumen tersebut baru disusun pada saat penelitian sedang berlangsung, dan baru selesai dibahas pada bulan Januari 2005. Adapun dokumen-dokumen sejenis yang telah disusun sebelumnya tidak dapat diaplikasikan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan paradigma yang ada. Sebagai akibat kurang baiknya mekanisme pembukaan program-program studi baru, muncul beberapa kasus dilapangan, dimana program-program studi tertentu yang sudah disosialisasikan dan sudah dianggarkan terpaksa tidak dibuka karena tidak ada peminatnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan 'need assesment' atau 'consumer analysis' belum dilaksanakan, padahal kegiatan tersebut sangat penting dalam upaya pembukaan program-program studi baru.

Ketiga, Perilaku kemitraan dari masing-masing perguruan tinggi yang diteliti sangat beragam, sebagian besar memang sudah menunjukkan perilaku yang baik, namun ada beberapa perguruan tinggi yang berperilaku tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan, antara lain kurang mengakomodir kepentingan Departemen Pekerjaan Umum dalam hal muatan kurikulum yang dibutuhkan pihak Departemen, terlalu kaku dalam menerapkan ketentuan administrasi pendidikan sehingga sulit menyesuaikan dengan mekanisme/ketentuan yang ada di Departemen, khususnya menyangkut waktu penganggaran dana kerjasama pendidikan yang dialokasikan di Departemen Pekerjaan Umum dengan ketentuan Tahun Ajaran yang ada di perguruan tinggi yang bersangkutan. Perilaku kemitraan yang kurang baik juga ditunjukkan oleh beberapa perguruan tinggi yang tidak merespon dengan baik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdiktek dalam rangka peningkatan kualitas dosen melalui serangkaian kegiatan TOT.

Demikian pula halnya masih ada beberapa perguruan tinggi yang belum sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling kepada karyasiswa.

Keempat, Indikator kualitas kemitraan nampaknya belum sepenuhnya difahami oleh masing-masing perguruan tinggi yang bermitra dengan Pusdiktek, hal ini dapat dilihat dari kurangnya keterlibatan dosen praktisi, tidak efektifnya tim teaching yang melibatkan dosen akademisi dan dosen praktisi. Disamping itu, kegiatan sosialisasi seringkali tidak efektif karena pihak Pusdiktek tidak melibatkan pihak perguruan tinggi maupun pemerintah daerah. Dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) belum semua perguruan tinggi concern dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran yang baik, koordinasi Balai dengan perguruan tinggi dalam rangka pelibatan dosen praktisi umumnya belum berjalan dengan baik. Khusus dalam hal kegiatan bimbingan konseling pada umumnya sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa perguruan tinggi sebagaimana dikemukakan diatas yang belum melaksanakan kegiatan ini dengan baik.

Kelima, sehubungan dengan berbagai permasalahan yang ditemukan dari hasil penelitian ini sebagaimana diuraikan diatas dan disini lain ditemukan banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama kemitraan ini, baik untuk perguruan tinggi mitra, instansi pengutus maupun Departemen Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum, maka hasil penelitian ini menawarkan langkah terobosan dengan mengembangkan model efektivitas manajemen kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan profesional kedinasan, yang diperkenalkan dengan model MPBK-PU. Disamping itu, model ini dikembangkan antara lain juga dalam rangka

menjawab berbagai perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya di bidang pendidikan kedinasan. Model MPBK-PU dikembangkan dengan pertimbangan bahwa Sekolah Tinggi Kedinasan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu Model MPBK-PU ini memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan pola kerjasama yang selama ini telah dilaksanakan Pusdiktek dengan berbagai perguruan tinggi

Keenam, model MPBK-PU ini sifatnya antisipatif terhadap perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan pendidikan kedinasan, sehingga model MPBK-PU ini dapat diterapkan secara universal di Departemen-Departemen lain.

Ketujuh, model MPBK-PU ini mempersyaratkan adanya peran aktif dari Pemda dan masyarakat, sehingga dalam penerapannya sangat terbuka dalam menerima saran dan tanggapan.

Kedelapan, penyelenggaraan pendidikan kedinasan dengan menggunakan model ini harus mengacu pada kepentingan masyarakat yang kompleks dan terus berubah di masa yang akan datang serta harus dapat menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Desentralisasi pendidikan dengan model kemitraan ini diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan pendidikan masa depan sesuai dengan situasi dan kondisi, kebutuhan, dan nilai-nilai yang berkembang di daerah. Oleh karena itu sebagaimana dikemukakan diatas, Model MPBK-PU ini berupaya mengakomodasi beberapa prinsip yang sangat penting dari kemitraan yakni melibatkan pemda provinsi dan pemda kota/kabupaten serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan profesional

kedinasan. Disamping itu Model MPBK-PU juga mengintegrasikan kuantitas dan kualitas produk, efisiensi, adaptasi dan fleksibilitas. Efektivitas kemitraan itu sendiri paling baik dapat dimengerti jika dilihat dari sudut sejauhmana kemitraan ini berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usahanya mengejar tujuan kemitraan.

Kesembilan, manfaat model MPBK-PU bagi perguruan tinggi antara lain dapat meningkatkan kualitas tenaga kependidikan khususnya yang terlibat dalam kegiatan pendidikan profesional kedinasan keahlian teknik. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan ini dapat diperoleh melalui keikutsertaan tenaga-tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan Seminar, Lokakarya, maupun serangkaian kegiatan TOT yang diselenggarakan Pusdiktek. Dalam kegiatan-kegiatan ini terjadi komunikasi dan saling memberikan masukan dalam peningkatan kualitas kurikulum, teknologi pembelajaran, kegiatan bimbingan konseling, dan sebagainya. Dengan demikian manfaat lain yang dapat diperoleh dengan mengimplementasikan model MPBK-PU yakni dapat mengembangkan Networking antar perguruan tinggi yang bermitra dengan Pusdiktek, sehingga dapat mengembangkan kerjasama kemitraan yang lebih luas antar masing-masing perguruan tinggi.

Kesepuluh, Model MPBK-PU ini akan memberikan manfaat yang besar bagi instansi pengutus, karena program studi yang diikuti oleh stafnya merupakan program studi yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas. Program studi ini dikembangkan berdasarkan hasil 'need assesment' yang disusun bersama-sama pemda propinsi, pemda kota, dan pemda kabupaten, sehingga diharapkan dapat menjawab masalah gap kompetensi dalam penyelenggaraan tugas.

Kesebelas, Departemen Pekerjaan Umum akan memperoleh banyak manfaat dari model MPBK-PU, karena dengan diimplementasikannya model ini akan banyak dihasilkan tenaga-tenaga profesional dalam penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum di berbagai daerah di Indonesia, sehingga 'quality control' dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dapat dilakukan melalui SDM yang profesional.

B. Implikasi

Sesuai kesimpulan sebagaimana dipaparkan diatas, maka ada beberapa implikasi yang perlu diperhatikan agar model MPBK-PU ini dapat diimplementasikan dengan baik yakni sebagai berikut:

Pertama, Faktor utama yang berpengaruh dalam kelancaran proses kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan profesional kedinasan yakni kualitas kebijakan dan manajemen kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan profesional kedinasan yang antara lain ditunjukkan dengan pola perilaku kemitraan, faktor-faktor strategis kemitraan, program kemitraan, dan indikator kualitas penyelenggaraan pendidikan. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan profesional kedinasan dengan menggunakan model MPBK-PU, Pusdiktek harus dapat mengembangkan organisasi yang sesuai dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan dimasa yang akan datang antara lain dengan membentuk satu unit khusus yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan evaluasi kemitraan. Unit ini dapat berupa unit struktural maupun unit fungsional.



Kedua, Penyelenggaraan pendidikan profesional kedinasan model kemitraan dimasa yang akan datang harus lebih 'concern' dengan kualitas sesuai model MPBK-PU antara lain, program studi dikembangkan dengan melibatkan customer (Pemda Provinsi, Kota dan Kabupaten), kurikulum dikembangkan bersama-sama dengan melibatkan semua instansi terkait sehingga kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, menyiapkan dosen akademisi dan praktisi yang memadai dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan program studi, sarana dan prasarana pendidikan harus dipelihara dengan baik dan dalam kondisi yang siap dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran, dana yang mencukupi untuk terlaksananya proses pembelajaran, serta diselenggarakan dengan baik melalui organisasi dan manajemen kemitraan yang baik.

C. Rekomendasi

Berdasarkan rumusan kesimpulan dan implikasi sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, Model MPBK-PU sebagai langkah terobosan dalam manajemen pendidikan berbasis kemitraan perlu diimplementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan kedinasan oleh setiap Departemen Teknis agar dapat memperoleh SDM yang berkualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan organisasi.

Kedua, Pemerintah Daerah Propinsi, Kota, dan Kabupaten perlu menetapkan peraturan daerah tentang persyaratan jabatan dalam dinas-dinas teknis, mengingat sangat strategisnya posisi ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing. Perda ini perlu dilaksanakan secara konsisten, sehingga dapat efektif guna menyaring tenaga-tenaga yang berkualitas untuk jabatan-jabatan strategis. Pemerintah

daerah hendaknya mengirimkan stafnya yang benar-benar potensial dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya peningkatan kinerja organisasi di daerahnya masing-masing. Pemda juga harus memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan dana untuk mendukung pendidikan stafnya sesuai ketentuan yang ditetapkan Pusdiktek dan Perguruan Tinggi Mitra.

Ketiga, Departemen Pekerjaan Umum harus menetapkan kriteria yang jelas dalam memilih dan menetapkan Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama dengan Pusdiktek secara objektif dengan mempertimbangkan keunggulan kompetitif, sehingga melalui kerjasama kemitraan ini diharapkan sumber-sumber yang tersedia dan dimiliki oleh masing-masing mitra akan saling melengkapi sehingga dicapai efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan profesional kedinasan ini.

Keempat, kepada semua institusi yang bermitra hendaknya konsisten melaksanakan prinsip-prinsip good governance untuk menjamin terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Bilamana diperlukan dapat memberikan sanksi yang tegas kepada seluruh jajaran dalam organisasinya yang mencoba melanggar prinsip-prinsip ini. Sanksi ini juga harus diberikan secara organisasi kepada mitra yang jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip good governance.

Kelima, Nota Kesepahaman yang dibuat dalam rangka kerjasama kemitraan ini harus merangkum berbagai prinsip dan nilai-nilai kemitraan yang dapat menjadi acuan atau pegangan serta mengikat masing-masing institusi yang bermitra untuk melaksanakan kegiatan dengan menggunakan model MPBK-PU. Tugas, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang bermitra serta stakeholders harus diatur secara rinci.

Keenam, Penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih mendalam terhadap berbagai institusi yang sangat terkait untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan model kemitraan ini, antara lain penelitian terhadap instansi pengutus, para alumni maupun masyarakat luas yang memanfaatkan lulusan dari pendidikan ini, untuk menilai sejauhmana kinerja lulusan program kemitraan ini sesuai dengan kebutuhan yang spesifik dari masyarakat yang memanfaatkannya.

